

**KELEMBAGAAN DAN KEMANDIRIAN PETANI DALAM PEMBANGUNAN
PERTANIAN**

***INSTITUTION AND INDEPENDENCE OF FARMERS IN AGRICULTURAL
DEVELOPMENT***

Afrizal Malik¹

Research Center for Circular Economics, Nasional Research and Innovation Agency

ABSTRACT

The urgency of the existence of farmer institutions in agricultural development in Indonesia, farmer independence, and strategies in developing farmer institutions so that they can become a means to realize independent farmers. The existence of farmer institutions for farmers has become a necessity to improve their standard of living, their dignity and worth. Farmers' institutions must be placed as a means to realize the hopes, desires, and fulfillment of farmers' needs. Effective farmer institutions are expected to be able to make a real contribution in increasing the independence and dignity of farmers. Increasing the institutional capacity of farmers is carried out in line with agricultural extension activities by motivating farmers to participate in farmer institutions. Agricultural extension needs to be designed to provide content on strengthening the capacity of individual farmers as well as strengthening the institutional capacity of farmers. Efforts that should be carried out by stakeholder parties, especially the government are: (1) Increasing the capacity of field extension workers, (2) Using participatory methods or approaches that are oriented to the needs of farmers in carrying out extension activities, and (3) Strengthening institutions counseling.

Keywords: Institutional, independence, defense

INTISARI

Urgensi eksistensi kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian di Indonesia, kemandirian petani, dan strategi dalam pengembangan kelembagaan petani sehingga mampu menjadi sarana untuk mewujudkan petani yang mandiri. Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Kelembagaan petani harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan memberikan muatan pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, terutama pemerintah adalah: (1) Meningkatkan kapasitas para penyuluh lapangan, (2) Menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang orientasi pada kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan, dan (3) Memperkuat kelembagaan penyuluhan.

Kata Kunci: Kelembagaan, kemandirian, pertanian

¹ Corresponding author: Afrizal Malik. Email: malikafrizal62@gmail.com

PENDAHULUAN

Harus kita akui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah dengan tingkat kesejahteraan yang masih relatif rendah. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Masyarakat petani miskin selain itu luas usahatani yang mereka garap yang sempit dan terbatas, juga disebabkan oleh produktivitas yang rendah; infrastruktur terbatas; aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar (Indraningsih, 2011; Daniel *et al.*, 2013; Malik *et al.*, 2013).

Bedasarkan pada orientasi pembangunan pertanian di Indonesia saat ini yang didasarkan pada sistem agribisnis maka peranan kelembagaan pertanian, termasuk didalamnya kelembagaan petani, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri (Oktavia *et al.*, 2016; Satriawan dan Oktavianti, 2022). Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani; aksesibilitas pada informasi pertanian; aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar dan adopsi inovasi pertanian. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain pada petani (Musyafak *et al.*, 2005; Suradisastira *et al.*, 2013).

Pentingnya kelembagaan petani diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani diharapkan mampu

membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal (Syahyuti, 2003; Indraningsih, 2011).

Upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani dilakukan melalui pengembangan kelembagaan pertanian, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas kelembagaan petani. Kenyataan menunjukkan bahwa program-program pembangunan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil secara individu yang jumlahnya sangat banyak (Khairunnisa *et al.*, 2019).

Situasi ekonomi yang ada, infrastruktur, serta kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah seringkali mendorong petani berlahan sempit dan buruh tani terdesak kearah marginalisasi secara ekonomi dan sosial. Selain penguasaan atas lahan pertanian yang sempit, nilai tukar pertanian yang rendah, kebijakan pertanian belum banyak berpihak kepetani semakin mendorong terpuruknya petani kedalam kemiskinan (Aulia *et al.*, 2021).

Terkait dengan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk menyampaikan hal, yaitu: (1) Urgensi eksistensi kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian; (2) Kemandirian petani, dan (3) Strategi dalam pengembangan kelembagaan petani sehingga mampu menjadi sarana untuk mewujudkan petani yang mandiri.

ARTI KELEMBAGAAN PETANI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor: teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan (Uphoff, 1986; Johnson (1985) dalam Syahyuti, 2003). Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan (*sufficient condition*) untuk mencapai *performance* pembangunan yang

dikehendaki. Artinya, apabila satu atau lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka tujuan untuk mencapai *performance* tertentu yang dikehendaki tidak akan dapat dicapai. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Sedangkan Sektor pertanian adalah salah satu sumber kehidupan bagi sebagian dari penduduk di Indonesia. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Perkembangan sektor pertanian difokuskan pada komoditas unggulan daerah, sehingga potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik (Prawoto, 2010; Oktavia *et al.*, 2016).

Menurut Syahyuti (2003); Surasdisastra (2008) perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa: (1) Proses pertanian memerlukan sumberdaya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya; (2) Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi; (3) Kegiatan pertanian mencakup tiga rangkaian: penyiapan *input*, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan *output* menjadi berharga; (4) Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal; dan (5) Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal.

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) kelembagaan didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal.

Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan (Indraningsih, 2011). Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Roucek dan Warren, 1984).

Kelembagaan petani yang dimaksud di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas, yang berupa organisasi keanggotaan yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama (Uphoff, 1986 dalam Syahyuti, 2003). Kelembagaan ini meliputi pengertian yang luas, yaitu selain mencakup pengertian organisasi petani, juga aturan main (*role of the game*) atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial-kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga itu. Kelembagaan petani dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu: (a) tugas dalam organisasi (*interorganizational task*) untuk memediasi masyarakat dan negara, (b) tugas sumberdaya mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja, modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat, (c) tugas pelayanan mungkin mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal, dan (d) tugas antar organisasi memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar (Esman dan Uphoff dalam Garkovich, 1989).

Suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan petani sehingga lembaga mempunyai fungsi. kelembagaan merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Pengelolaan sumberdaya usahatani oleh petani menyangkut pengaturan masukan, proses produksi, serta keluaran sehingga mencapai produktivitas yang tinggi. Usaha pertanian sendiri meliputi kegiatan-kegiatan *input* dan *output*. Dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, proses produksi, sampai dengan pengolahan hasil diperlukan kelembagaan petani.

Kegiatan usaha pertanian akan berhasil jika petani mempunyai kapasitas yang memadai. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman mengenai suatu kelembagaan ditingkat petani. Secara tradisional, kelembagaan masyarakat petani sudah berkembang dari generasi kegenerasi, namun tantangan zaman menuntut suatu kelembagaan yang lebih sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Kelembagaan petani yang efektif ini diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian. Ditingkat petani lembaga diperlukan sebagai: (a) wahana untuk pendidikan, (b) kegiatan komersial dan organisasi sumberdaya pertanian, (c) pengelolaan properti umum, (d) membela kepentingan kolektif.

Syahyuti (2003); Soedijanto (2004); Surasdisastra (2008) keberadaan kelembagaan petani didasarkan atas kerjasama yang dapat dilakukan oleh petani dalam mengelola sumberdaya pertanian, antara lain: (a) pemrosesan, agar lebih cepat, efisien dan murah; (b) pemasaran, akan meyakinkan pembeli atas kualitas dan meningkatkan posisi

tawar petani; (c) pembelian, agar mendapatkan harga lebih murah; (d) pemakaian alat-alat pertanian (*machine sharing*), akan menurunkan biaya atas pembelian alat tersebut; (e) kerjasama pelayanan (*cooperative services*), untuk menyediakan pelayanan untuk kepentingan bersama sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota; (f) bank kerjasama (*co-operative bank*); (g) kerjasama usahatani (*co-operative farming*), akan diperoleh keuntungan lebih tinggi dan keseragaman produk yang dihasilkan; dan (h) kerjasama multi tujuan yang dikembangkan sesuai minat yang sama dari petani. Kegiatan bersama oleh para petani diyakini oleh Mosher (1991) sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian. Aktivitas bersama sangat diperlukan apabila dengan kebersamaan tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

KEMANDIRIAN PETANI MELALUI KELEMBAGAAN PETANI

Konsep kemandirian petani yang sederhana adalah bagaimana keinginan dan kemampuan petani dalam mengolah lahannya dengan baik dan benar sesuai aturan serta mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara optimal tanpa ada paksaan dari berbagai pihak dengan tujuan mencapai kesejahteraannya (Ramdhan *et al.*, 2020). Menurut Syahyuti (2003); Soedijanto (2004); Surasdisastra (2008) meliputi: (a) Kemandirian material, artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam yang mereka miliki sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain atau tergantung dari luar; (b) Kemandirian intelektual, artinya memiliki kapasitas untuk mengkritisi dan mengemukakan pendapat tanpa dibayangi oleh rasa takut atau tekanan dari pihak lain; (c) Kemandirian pembinaan, artinya memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri sendiri melalui proses belajar tanpa harus tergantung pihak luar; dan (d) Sebagai manusia

yang interdependensi, artinya dalam melaksanakan kegiatannya selalu terdapat saling ketergantungan dengan manusia lain di dalam masyarakatnya sebagai suatu sistem sosial.

Dijelaskan oleh Verhagen (1996), sarana untuk mencapai kemandirian adalah adanya keswadayaan. Swadaya adalah setiap tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok manusia yang bertujuan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi-aspirasi individual atau kolektif.

Pemilikan yang terbatas dan akses pemilikan yang juga terbatas terhadap sumberdaya menyebabkan tingkat kemandirian yang rendah. Dalam hal ini ketergantungan terhadap faktor eksternal menjadi sangat tinggi. Penyatuan potensi, serta penumbuhan nilai-nilai untuk menghargai diri sendiri dan sesama, kepercayaan, komunikasi dan kerjasama, yang diwujudkan dalam suatu wadah kelompok, pada akhirnya menjadi organisasi, diyakini sebagai strategi dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Kemandirian petani diyakini sebagai muara dari suatu usaha pembangunan pertanian.

Sarana untuk mencapai kemandirian adalah adanya keswadayaan. Kemandirian dan keswadayaan individu dapat terwujud melalui proses-proses sosial dalam kelembagaan yang ada di masyarakat (Christenson dan Robinson, 1989; ECDPM, 2006). Kapasitas atau kemampuan petani merupakan salah satu prasyarat bagi petani untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan bagi masyarakat petani dianggap penting karena beberapa alasan. Pertama, dipecahkan oleh suatu lembaga petani. Kedua, organisasi masyarakat memberikan kelangngan atau kontinuitas pada usaha-usaha untuk menyebarkan dan mengembangkan teknologi, atau pengetahuan teknis kepada masyarakat. Ketiga, untuk menyiapkan

masyarakat agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang terbuka (Bunch, 1991).

Strategi pembangunan pertanian memerlukan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pengelolaannya karena berbagai pertimbangan (a) meningkatkan integrasi, (b) meningkatkan hasil dan merangsang penerimaan yang lebih besar terhadap kriteria hasil, (c) membantu menghadapi permasalahan nyata dari kesenjangan tanggapan terhadap perasaan, kebutuhan, masalah, dan pandangan komunitas lokal, (d) membawa kualitas hasil (*output*) lebih tinggi dan berkualitas, (e) meningkatkan jumlah dan ketepatan informasi, dan (f) memberikan operasi yang lebih ekonomis dengan penggunaan lebih banyak sumberdaya manusia lokal dan membatasi transportasi dan manajemen yang mahal (Claude dan Zamor, 1985).

STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembangunan atau pengembangan kelembagaan seyogyanya dapat menjadikan kelembagaan menjadi bagian penting dalam kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usahatani (Syahyuti, 2003). Pengembangan kapasitas kelembagaan petani merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara.

Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau

yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan lembaga (Esman, 1986).

Pengembangan kelembagaan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitasnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan anggota. Artinya, secara sosial-ekonomi lembaga tersebut: (a) mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; (b) sejauhmana inovatif (mengadakan pembaharuan) dipandang oleh lingkungannya sebagai memiliki nilai *intrinsik*, yang dapat diukur secara operasional dengan indeks-indeks seperti tingkat otonominya dan pengaruhnya terhadap lain-lain lembaga; dan (c) sejauh mana suatu pola inovatif dalam organisasi baru itu menjadi normatif bagi lain-lain kesatuan sosial dalam sistem sosial yang lebih besar (Jiri Nehnevajsa dalam Eaton, 1986).

Unsur-unsur dalam lembaga, seperti dikemukakan Esman (1986), dapat dijadikan parameter untuk menilai kapasitas suatu lembaga: (1) Adanya kepemimpinan, yang menunjuk pada kelompok orang yang secara aktif berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program dari lembaga tersebut dan yang mengarahkan operasi-operasi dan hubungan-hubungannya dengan lingkungan tersebut, (2) Adanya spesifikasi nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial anggota, (3) Adanya program, menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut, (4) Adanya sumberdaya-sumberdaya, yaitu masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerangan dari lembaga tersebut, dan (5) Terbentuknya struktur intern, yaitu struktur dan proses-proses yang

diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya.

Secara ringkas, kapasitas kelembagaan petani, menurut Anantanyu (2009), dapat tercapai dengan melihat empat indikator, yaitu: (1) Tujuan kelembagaan kelompok petani tercapai, artinya: adanya kejelasan tujuan, adanya kesesuaian tujuan dengan kebutuhan anggota, dan tingkat pemenuhan kebutuhan anggota oleh kelembagaan tinggi, (2) Fungsi dan peran kelembagaan berjalan, meliputi: adanya kemampuan memperoleh, mengatur, memelihara, dan mengerahkan informasi, tenaga kerja, modal, dan material, serta kemampuan mengelola konflik, (3) Adanya keinovatifan kelembagaan, meliputi: adanya peran kepemimpinan dalam kelembagaan, fungsi kepemimpinan dalam kelembagaan berjalan, adanya nilai-nilai yang mendasari kerjasama, adanya pembagian peran anggota, adanya pola kewenangan dalam kelembagaan, adanya komitmen anggota terhadap kelembagaan, tersedia sumber-sumber pendanaan, tersedia fasilitas-fasilitas fisik, kualitas sumberdaya anggota memadai, dan adanya teknologi yang sesuai dan (4) Keberlanjutan kelembagaan, meliputi: sentimen anggota baik, kesadaran anggota tinggi, kekompakan anggota terjadi, kepercayaan anggota besar, tersedia bantuan luar, pola komunikasi antar anggota dua arah, dan adanya kerjasama dengan pihak lain.

Salah satu peran penyuluhan pertanian adalah mengembangkan kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi sendiri. Penyuluhan, menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), diartikan sebagai proses yang membantu petani dalam: menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan kedepan; meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu

menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani; memperoleh pengetahuan khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkan; memutuskan pilihan yang tepat yang menurut pendapat petani sudah optimal; meningkatkan motivasi petani untuk menetapkan pilihannya; dan mengevaluasi dan meningkatkan ketrampilan dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan.

Kelembagaan petani dalam melaksanakan perannya memerlukan pengorganisasian dengan ketrampilan-ketrampilan khusus untuk memberikan dorongan dan bantuan secara sistematis. Secara ideal, pengembangan kapasitas kelembagaan petani dilakukan melalui pendekatan *self-help* (membantu diri sendiri). Pendekatan yang berorientasi proses, membantu masyarakat dalam belajar bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri. Penyuluhan didasarkan premis bahwa masyarakat dapat, akan, dan seharusnya bersama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan komitmen masyarakat untuk membantu dirinya sendiri, tanpa komitmen dalam kelembagaan akan terjadi kesenjangan kapasitas untuk mencapai efektivitas kegiatan.

Dalam kelembagaan petani, perlu ada penumbuhan kesadaran bagi petani tentang pengaruh luar yang membatasi usahanya, serta identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat pengaruh tersebut untuk selanjutnya menentukan pemenuhannya. Mengembangkan kapasitas kelembagaan petani adalah tugas pemerintah melalui kelembagaan penyuluhan pertanian.

Penyuluh pertanian, baik pegawai pemerintah maupun swasta, merupakan anggota atau staf dari institusi yang menugaskannya sehingga tidak jarang dalam melakukan pekerjaannya lebih berorientasi pada kepentingan dinas daripada kepentingan petani. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan

kapasitas kelembagaan petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya.

Hendayana dan Malik (2006); Anantanyu (2009), langkah-langkah tindakan strategis dalam mengembangkan kelembagaan petani dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Peningkatan dukungan penyuluhan pertanian (a) Meningkatkan kompetensi penyuluh dalam memfasilitasi petani, meliputi: penguasaan materi, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap sasaran, serta adanya komitmen terhadap profesi.

Penggunaan pendekatan penyuluhan yang tepat sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran, meliputi: kesesuaian informasi, ketepatan metode, penggunaan berbagai teknik penyuluhan, dan penggunaan media dalam penyuluhan.

Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, meliputi: ketersediaan program penyuluhan, kemudahan akses, dukungan fasilitas yang diperlukan, dan pelaksanaan program, (2) Peningkatan peran pihak luar (a) Memfasilitasi adanya dukungan kepemimpinan lokal, (b) Menjembatani peran pihak luar (pemerintah, swasta, dan kelembagaan lain), (3) Peningkatan kedinamisan kelompok sebagai kelompok pembelajar, melalui: (a) Peningkatan pemahaman tujuan kelompok, (b) Mengembangkan struktur, (c) Mengembangkan fungsi tugas, (d) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelompok, (e) Meningkatkan kekompakan kelompok, (f) Mendorong kekondusifan suasana kelompok, (g) Menciptakan ketegangan kelompok, dan (h) Mendorong keefektifan kelompok. (4) Peningkatan kapasitas petani, dilakukan melalui: (a) Peningkatan pendidikan, baik formal maupun non-formal, bagi petani yang mendukung bidang usaha atau agribisnis, (b) Memfasilitasi dalam berbagai kegiatan

agribisnis, (c) Mendorong kemampuan berusaha untuk meningkatkan pendapatan, (d) Memfasilitasi penyediaan sarana, dan (e) kegiatan agribisnis bagi petani serta (f) Menyediakan sumber-sumber belajar termasuk informasi yang diperlukan oleh petani. (5) Peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan petani. Partisipasi anggota dalam kelembagaan dimaknai sebagai pilihan anggota komunitas secara aktif untuk berperan mengaktualisasikan diri dalam usaha memperbaiki kualitas hidup. Upaya peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan dilakukan dengan proses-proses yang bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kelembagaan petani, yang meliputi: (a) Penysadaran, antara lain: penumbuhan pemahaman terhadap masalah secara spesifik, Penyediaan sarana sosial, (b) menumbuhkan kepemimpinan lokal, menumbuhkan kerjasama, membangun wawasan tentang kehidupan bersama, menciptakan komitmen kebersamaan, dan meningkatkan kemampuan berusahatani dan kemampuan sosial, (c) Pengorganisasian, antara lain: peningkatan kemampuan manajemen sumberdaya, peningkatan kemampuan pengambilan keputusan bersama, pengembangan kepemimpinan, dan penyediaan sarana dan prasarana dan (d) kelembagaan serta (e) Pemantapan, antara lain: pemantapan terhadap visi kelembagaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan, dan membangun jaringan dan kerjasama antar kelembagaan (Hariadi, 2009; Suchatiningsih dan Waridin, 2010; Anantanyu, 2011; Hermanto dan Swastika, 2011; Mukhlis, 2020; Romadi dan Warnaen, 2021).

PENUTUP

Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Kelembagaan petani harus

ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan memberikan muatan (*content area*) pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, terutama pemerintah adalah: (a) Meningkatkan kapasitas para penyuluh lapangan, (b) Menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan, dan (c) Memperkuat kelembagaan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S. 2009. Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Disertasi pada Institut Pertanian Bogor
- Anantanyu S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. (SEPA) Vol. 7 (2). Hal 102–109.
- Aulia, S. S., D. S. Rimbodo dan M. G. Wibowo. 2021. Faktor-faktor yang Memengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia. Journal of Economics and Business Aseanomics. Vol. 16 (1). 2021. Hal 44-59.
- Bunch, Roland. 1991. Dua Tongkol Jagung: Pedoman Pengembangan Pertanian

Berpangkal Pada Rakyat. Terjemahan oleh Ilya Moeliono. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Christenson, James A. 1989. Themes of Community Development *dalam* Community Development in Perspective. Diedit oleh James A. Christenson dan Jerry w. Robinson, Jr. Iowa State University Press. Iowa. Hal. 26 – 47.

Claude, Jean dan Garcia Zamor. 1985. An Introduction to Participative Planning and Management dalam Public Participation in Development Planning and Management: Cases from Africa and Asia. Editor Jean Claude dan Garcia Zamor. Westview Press. London.

Daniel, M., A. Malik dan Jonharnas. 2013. Perubahan Paradigma Dalam Proses Pembangunan Pertanian. Bunga Rampai Pengembangan Agribisnis. Inovasi Teknologi dan Perbakian Sistem Dalam Pengembangan Agribisnis. Penerbit: Kristal Multimedia, April 2013

Eaton, Joseph W. 1986. “Petunjuk bagi Perumusan Teori Pembangunan” dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: dari Konsep ke Aplikasi. Editor J.W. Eaton. UI Press. Jakarta. Hal 157 – 167.

ECDPM. 2006. Institutional Development: Learning by Doing and Sharing. European Centre for Development Policy management (ECDPM), Netherlands Ministry of oreign Affairs, Poverty Policy and Institutional Division. <http://www.ecdpm.org/Esman>.

Garkovich, Lorraine E. 1989. “Local Organizations and Leadership in Community Development” dalam Community Development in Perspective. Editor James A. Christenson dan Jerry W. Robinson, Jr. Iowa State University Press. Iowa. Hal. 196 – 218.

Hendayana, R dan A. Malik. 2006. Determinasi Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian pada Penduduk Lokal di Kabupaten Merauke Papua *dalam* Limbongan *et al.*, (eds) Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian BPTP Papua. Kerjasama BBPPTP dengan Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura 24-25 Juli 2006. Hal 423-431.

Hariadi, S.S. 2009. Penyuluhan Dialogis untuk Menadikan Petani Penyuluh dan Mandiri. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. 25 Pebruari 2009.

Khairunnisa., A, Saleh dan O.M. Anwas. 2019. Penguatan Kelembagaan Petani Padi dalam Pengambilan Keputusan Adopsi Teknologi IPB Prima. Jurnal Penyuluhan. Vol 15 (1). Maret 2019. Hal 89-96

Mosher, A T. 1991. Getting Agriculture Moving. Frederick A. Praeger, Inc. Publishers. New York.

Musyafak, A dan Tatang M.I. 2005. Strategi Percepatan Adopsi dan Difusi Inovasi Pertanian Mendukung Primatani. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Malik, A., S. Utomo., Misran., Erdiman dan M. Daniel. 2013. Model Pembangunan Pertanian dan Pemberdayaan Petani. Bunga Rampai Eksistensi Petani Indonesia. Pemberdayaan Petani dan Ketahanan Pangan. Penerbit: Kristal Multimedia, April 2013.

Mukhlis, M. 2020. Analisis Isu Kebijakan Dalam Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan (Studi Pada Kelembagaan Penyuluh Di Kabupaten Pesawaran). Jurnal

- Analisis Sosial Politik. Vol. 4 (2). Desember 2020. Hal. 66-78.
- Pusat Bahasa. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Prawoto, N. 2010. Pengembangan Potensi Unggulan Sektor Pertanian. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 11 (1), April 2010. Hal.1-19
- Indraningsih, K.S. 2011. Pengaruh penyuluhan terhadap keputusan petani dalam adopsi inovasi teknologi usahatani terpadu. Jurnal Agro Ekonomi Vol. 29 (1): 1-24.
- Roucek, J S. dan Roland L. Warren. 1984. Pengantar Sosiologi. Terjemahan oleh Sahat Simamora. Bina Aksara. Jakarta.
- Ramdhan, R J., D. Kusnadi dan Harniati. 2020. Kemandirian Petani Terhadap Pemanfaatan Jerami Padi Sebagai Pupuk Bokashi Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 (3) Agustus 2020. Hal 483-490.
- Romadi, U A. Warnaen. 2021. Sistem Penyuluhan Pertanian Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger Tohar Media. Juli 2021.
- Oktavia, H., Hanani, N., dan Suhartini, S. 2016. Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Pendekatan Input-Output). Habitat. <https://doi.org/10.21776/Ub.Habitat.2016.027.2.9>
- Susetiawan. 2000. Perubahan Paradigma Pembangunan. Bahan Pembelajaran TOT
- Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi 17-23 Nopember 2000.
- Syahyuti. 2003. Alternatif Konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi Dalam Penelitian Sosiologi. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol 21 (2), Desember 2003. Hal 113 – 127. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor
- Soedijanto. 2004. Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Pembangunan Agribisnis. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Suradisastra, K. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. Forum Penelitian Agro-Ekonomi. Vol 26 (2) Desember 2008. Hal 82-91
- Suradisastra, K., A. Malik., N. Sutrisno dan Ai. Dariah. 2013. Arah Pembangunan Sektor Pertanian Perbatasan Papua-PNG. Kemandirian Pangan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan. IAARD PRESS. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Desember 2013.
- Sucihatiningih dan Waridin. 2010. Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Usahatani Melalui Transaction Cost Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 (1). 1, Juni 2010. Hal.13-29
- Satriawan, B dan H. Oktavianti. 2022. Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.13 (1), Juni 2012, hal. 96-112.

Uphoff, Norman Thomas. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.

Van den Ban, A.W dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Terjemahan oleh A.D. Herdiasti. Kanisius. Yogyakarta.

Verhagen, Koenraad. 1996. engembangan Keswadayaan: Pengalaman LSM di Tiga Negara. Terjemahan. Puspa Swara. Jakarta.